

TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MP PNBP PADA BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

WIAN SHAFKA KAMILA



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
Bogor Indonesia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan proyek akhir dengan judul “Tahapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur MP PNPB Pada Biro Keuangan Kementerian Perhubungan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan proyek akhir ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2024

Wian Shafa Kamila
J0314201132



ABSTRAK

WIAN SHAFKA KAMILA. Tahapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur MP PNBPN Pada Biro Keuangan Kementerian Perhubungan. Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Proyek akhir ini menjelaskan tahapan penyusunan standar operasional prosedur Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBPN) pada Biro Keuangan Kementerian Perhubungan. Permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan MP PNBPN antara lain, masih terdapat keterlambatan pengajuan MP PNBPN, terdapat beberapa unit Eselon I masih memiliki utang MP PNBPN tahun sebelumnya, serta pengalokasian MP PNBPN belum sesuai kebutuhan. Laporan proyek akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan MP PNBPN dan menyusun standar operasional prosedur MP PNBPN pada Biro Keuangan Kementerian Perhubungan. Hasil dan pembahasan menjelaskan pengelolaan MP PNBPN di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta tahapan penyusunan standar operasional prosedur MP PNBPN Biro Keuangan Kementerian Perhubungan. Menghasilkan dua standar operasional prosedur yaitu SOP Pengajuan MP PNBPN dan SOP Monitoring Evaluasi MP PNBPN, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun SOP Bagian PNBPN Biro Keuangan Kementerian Perhubungan.

Kata Kunci: Maksimum Pencairan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Standar Operasional Prosedur

ABSTRACT

WIAN SHAFKA KAMILA. Stages of Standard Operating Procedure Preparation for MP PNBPN at the Finance Bureau of the Ministry of Transportation. Supervised by NOVI ROSYANTI.

This final project explains the stages of preparing standard operational procedures for the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue (MP PNBPN) at the Finance Bureau of the Ministry of Transportation. Problems encountered in the management of MP PNBPN include, there are still delays in submitting MP PNBPN, there are several Echelon I units that still have MP PNBPN debt from the previous year, and the allocation of MP PNBPN does not meet needs. This final project report aims to determine the MP PNBPN management mechanism and develop standard operational procedures for MP PNBPN at the Finance Bureau of the Ministry of Transportation. The results and discussion explain the management of MP PNBPN within the Ministry of Transportation, as well as the stages of preparing standard operational procedures for MP PNBPN Finance Bureau of the Ministry of Transportation. Produced two standard operational procedures, namely the SOP for Submitting MP PNBPN and the SOP for Monitoring and Evaluation of MP PNBPN, which will then be followed up by the SOP Drafting Team for the PNBPN Section of the Finance Bureau of the Ministry of Transportation.

Keywords: Maximum Disbursement, Non-Tax State Revenue, Standard Operating Procedures



Judul Proyek Akhir : Tahapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur MP
PNBP Pada Biro Keuangan Kementerian Perhubungan
Nama : Wian Shafa Kamila
NIM : J0314201132

@Hak cipta milik IPB University

Pembimbing:
Novi Rosyanti, S.E., M.Ak.

Disetujui oleh

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak.
NPI 201807198706232001

Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP 196607171992031003



Tanggal Ujian: 19 Juni 2024

Tanggal Lulus:



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya sehingga laporan proyek akhir ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian proyek akhir yang dilaksanakan sejak 22 Januari 2024 sampai 1 Maret 2024 ini ialah Akuntansi Pemerintah, dengan judul “Tahapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur MP PNBP Pada Biro Keuangan Kementerian Perhubungan”.

Selama penyusunan laporan proyek akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Iwan Sugandi dan Novita Lian Kopa. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang diberikan sehingga penulis mampu berjuang menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan.
2. Bapak Dr. Ir. Aceng Hidayat. M.T. selaku Dekan Sekolah Vokasi IPB.
3. Ibu Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
4. Ibu Novi Rosyanti, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran masukan terhadap laporan proyek akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Bapak Irwandi, S.Kom., M.Eng. selaku mentor lapangan yang telah membimbing, mendampingi serta memberikan arahan selama penulis melaksanakan magang di Bagian PNBP Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
6. Seluruh Keluarga Besar Bagian PNBP Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang telah membantu penulis dengan memberikan pengetahuan, arahan, dan hiburan selama kegiatan magang.
7. Bapak Ir. Mochammad Joni, selaku Pimpinan penulis di KJPP Toto Suharto & Rekan yang telah memahami kegiatan penulis selama penyelesaian laporan proyek akhir dan penyelesaian pendidikan Sarjana Terapan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian proyek akhir.
9. Tak lupa kepada Diri Sendiri yang telah bertahan sejauh ini untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga proyek akhir ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juni 2024

Wian Shafa Kamila



DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	5
2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Perhubungan	6
2.3 Maksimum Pencairan (MP) PNBP	8
2.4 Standar Operasional Prosedur	8
III METODE	12
3.1 Gambaran Objek Penelitian	12
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	16
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Pengelolaan MP PNBP Pada Biro Keuangan Kementerian Perhubungan	18
4.2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur MP PNBP Biro Keuangan Kementerian Perhubungan	24
V SIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Simpulan	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	40
RIWAYAT HIDUP	55



DAFTAR TABEL

1	Jumlah satuan kerja pada setiap unit Eselon I	14
2	Daftar pertanyaan wawancara	16
3	Tren Sisa MP TAYL 2020-2023 Ditjen Perhubungan Laut	19
4	Tren Sisa MP TAYL 2020-2023 Ditjen Perhubungan Udara	19
5	Tren Sisa MP TAYL 2020-2023 Ditjen Perhubungan Darat	20
6	Realisasi MP PNBK TA 2023 Ditjen Perhubungan Laut	20
7	Realisasi MP PNBK TA 2023 Ditjen Perhubungan Udara	21
8	Realisasi MP PNBK TA 2023 Ditjen Perhubungan Darat	22
9	Satker dengan penyerapan terendah berdasarkan MP PNBK	24
10	Ketentuan simbol SOP	24
11	Hasil inventarisasi dokumen SOP PNBK yang sudah ada	26
12	Kebutuhan SOP Biro Keuangan	27

DAFTAR GAMBAR

1	Kontribusi elemen penerimaan negara tahun 2014-2023	9
2	Perkembangan realisasi dan belanja sumber dana PNBK BLU (2019-2023)	2
3	Struktur organisasi Kementerian Perhubungan	12
4	Tren Belanja PNBK Tahun 2023 Kumulatif Ditjen Perhubungan Laut	21
5	Tren Belanja PNBK Tahun 2023 Kumulatif Ditjen Perhubungan Udara	22
6	Tren Belanja PNBK TA 2023 Kumulatif Ditjen Perhubungan Darat	23
7	Lembar identitas SOP Pengajuan MP PNBK	29
8	Diagram Alir (<i>flowcharts</i>) Pengajuan MP PNBK	30
9	Lembar identitas SOP Monitoring Evaluasi MP PNBK	32
10	Diagram Alir (<i>flowcharts</i>) Pengajuan MP PNBK	33
11	Berita Acara Pembahasan SOP MP PNBK	35
12	Berita Acara Pengusulan SOP MP PNBK	36

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Usulan konsep naskah SOP Monitoring Evaluasi MP PNB	41
2	Lampiran 2 Usulan konsep naskah SOP Pengajuan MP PNBK	44
3	Lampiran 3 Naskah SOP Izin Penggunaan yang telah disahkan	47
4	Lampiran 4 Berita Acara <i>review</i> dan pembahasan konsep naskah SOP MP PNBK	50
5	Lampiran 5 Berita Acara pengusulan konsep naskah SOP MP PNBK	51
6	Lampiran 6 Undangan Evaluasi Penggunaan Sumber Dana PNBK Kementerian Perhubungan TA 2023	52
7	Lampiran 7 Undangan <i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan SOP Pengelolaan PNBK Kementerian Perhubungan	53
8	Lampiran 8 Hasil wawancara	54